

PEMUKIMAN HALIM:

Sekilas Pemukiman Halim:

Pemukiman Halim terletak Kampung Sawah, Kelurahan Kebon Pala RT 001/006 Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Semula adalah lahan kosong yang berupa rawa-rawa, serta kelokan sungai Cipinang yang diluruskan oleh Kopro Banjir, selanjutnya bekas kelokan kali tersebut kemudian diurug dijadikan tempat pemukiman.

Melalui kasus penggusuran, pendampingan warga Halim dapat masuk lebih intensif. Komunitas warga Halim sangat beragam, mayoritas adalah kaum “urban”; berasal dari; Sumatera Utara (Batak), Palembang, Padang, Lampung, Banten, Sunda, Kuningan, Indramayu, Cirebon, Jawa Tengah (Tegal, Banyumas, Semarang), Wonogiri, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Timur (Flores), Ambon, Bugis, dll, mayoritas adalah Jawa.

Profesi mereka berbagai macam; pedagang, tukang kunci, tukang kayu, gali tanah, pemulung, buruh cuci, Warteg, sopir, karyawan, dll. Pekerjaan sehari-hari mayoritas adalah pedagang.

Permasalahan yang dihadapi oleh warga sangat kompleks, bahkan masalah yang dianggap “sepele” dapat menjadi permasalahan yang serius. Pada sisi lain keanekaragaman juga menjadi kekuatan tersendiri, buktinya warga dapat bertahan sampai sekarang meski dengan berbagai kendala dalam kesehariannya. Dengan adanya keanekaragaman dapat menghacurkan komunitas, namun pada sisi lain keanekaragaman juga sekaligus dapat sebagai pemersatu warga Halim khususnya. Pemukiman Halim sangat rentan penggusuran, apalagi kalau dilihat dengan hanya kaca mata sebelah, yaitu dari sisi hukum belaka tanpa memandang dasi segi kemanusiaan.

Advokasi Penggusuran:

Pada awal bulan Januari 2002 Pemukiman Halim akan digusur oleh Tramtib, warga (bapak Wignyo, Hutajulu, Huta Hayan, dan Natal) sudah mendapat Surat Perintah Bongkar (SPB) ke III.

Tanggal 16 Januari 2002, warga melalui wakilnya (bapak Mulyono, bapak Wignyo, dkk) mendatangi Tramtib Walikota Jakarta Timur untuk menanyakan masalah penggusuran. Warga berhasil menemui pihak Tramtib Jakarta Timur, kemudian berdialog dengan memberikan berkas dan data pemukiman. Proses selanjutnya pihak Walikota Jakarta Timur akan memperlajari berkas-berkas yang diberikan oleh warga Pemukiman Halim. Belum memberikan janji apa-apa.

Pada bulan Maret 2002, kembali Pemukiman Halim diancam digusur, penggusuran tersebut kelanjutan SPB pada bulan Januari 2002. Warga mengadu ke Polres Jakarta Timur. Hasilnya warga membangun kembali (bapak Haris).

Tanggal 25 April 2002, Warga Pemukiman Halim mengadakan pertemuan di Mushola, untuk membahas “Penghentian Pemagaran”. Haji Entong, marah-marah dengan membawa sebilah golok, tidak boleh adanya pemagaran. Hasil kesepakatan,

pemagaran boleh dilakukan dengan batas 2-4 meter dari batas Mushola. Masalah kesepakatan pemagaran berhenti karena Haji Saedi tidak bersedia hadir dalam pertemuan, dan tidak bersedia menjelaskan batas-batas mana yang harus dipagar.

Dalam menindaklanjuti masalah penggusuran pemukiman, warga kemudian mengirim surat ke Menkimpraswil, yang isinya; "Warga tetap bertahan, atau Relokasi". Meski sudah berkirim ke Menteri Erna Witoelar, masalah penggusuran tetap menjadi momok bagi warga.

Syarat Relokasi:

1. Pemukiman baru tetap berada di Wilayah Jakarta Timur dengan jarak antara 10-15 km dari pemukiman.
2. Warga mendapat lahan, \pm 50 meter persegi dan dapat diangsur sesuai kemampuan warga.
3. Bahan-bahan bangunan rumah, berasal dari warga.
Yang perlu dicermati adalah dampak relokasi perpindahan warga pada pemukiman yang baru, misalnya ongkos pindah rumah dan masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dll.

Catatan Peristiwa:

Perihal Undangan dari LPM UI, pada hari Rabu, 14 Agustus 2002 di Hotel Cemara, perihal Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978, tentang Pengaturan Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Wilayah DKI Jakarta. Undangan tersebut mendapat sambutan baik oleh pedagang Halim maupun warganya. Namun pada hari "H" pertemuan dibatalkan, peristiwa ini sangat memukul mereka. Mereka ditemui di lobby kolam renang Hotel Cemara, panitia dari LPM UI dengan basa-basi meminta maaf tidak dapat mengikutsertakan warga Halim dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1978 bersama Pemprov DKI. Selanjutnya panitia akan mengganti transport serta mengajak untuk makan siang bersama, tetapi semuanya ditolak mentah-mentah oleh warga Halim. LPM UI sebelumnya tampak semangat dan berpihak dengan para pedagang merespon apa yang dikeluhkan serta permasalahan para pedagang. Apalagi dalam hasil penelitiannya di Halim, mahasiswa LPM UI berjanji akan menyampaikan dalam pertemuan bersama pembuat kebijakan.

Masalah lain adalah pelurusan Kali Cipinang, warga Halim sudah membuat surat ke AURI Halim Perdana Kusuma. Isi surat intinya adalah mohon ijin atas pelurusan Kali Cipinang, karena kali tersebut akan melintas di atas tanah milik AURI. Pihak AURI sampai sekarang belum ada surat balasan, atau surat perijinan untuk proyek tersebut.

Warga Halim pada saat ini sedang disibukan pada acara "Tujuhbelas Agustus-an". Warga akan mengadakan hiburan Dangdut, acara dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Agustus 2002. Dana diperoleh dari warga, dan beberapa pengusaha sekitar serta pedagang Halim. Warga seberang "Cawang dekat Kantor Perumnas" akan menyumbang hiburan Poco-poco.

- Kawasan pemukiman dalam keadaan aman, warga Halim belum mengadakan pertemuan warga yang khusus membicarakan masalah pemukiman. Warga pemukiman dan pedagang sedang bermusyawarah atas pemagaran di depan PKL Halim. Pemagaran sepanjang 100 meter pada hari Jumat, 16 Agustus 2002 yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Kodya Jakarta Timur, yang dipimpin oleh Pasaribu. Beralamat di Jl. Perserikatan No. 1 Rawamangun, Jakarta Timur. Tim pelaksana pemagaran yaitu: Mandor: Pasaribu, yang membawahi tujuh pekerja dan satu tentara.
- Pemagaran tidak ada musyawarah dengan para PKL, akibat pemagaran tersebut pendapatan pedagang menurun. Barang dagangannya bervariasi yaitu; rokok, warung nasi, mie rebus, soto ayam, sate, lapo tuak, dan billiar.

Pedagang Halim berencana akan membuat surat ke Walikota Jakarta Timur untuk musyawarah masalah pemagaran tersebut. Sempat terjadi nada emosional, mereka akan melakukan pembongkaran pagar. Akan tetapi diingatkan oleh pedagang sendiri, kalau pagar tersebut dibongkar dapat memancing kemarahan aparat untuk menggusur para PKL. Contohnya seperti di PKL Cawang pada bulan lalu, akibat pagar dibongkar oleh pedagang maka PKL diobrak-abrik oleh Tramtib.

- Masalah lain adalah para pedagang sering dimintai jatah oleh Tramtib Kelurahan Makasar yang bernama Nasution dengan membawa delapan anak buah (satu mobil Tramtib), setiap pedagang rokok dimintai satu bungkus rokok.
- Operasi preman di Cawang yang dilakukan oleh Intel Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2002 (pkl 10.30) berhasil menangkap satu preman bernama Nasution. Situasi terakhir para preman yang nongkrong di Cawang menyingkir.

Catatan: Stevany telah melakukan kunjungan ke Cawang dan Halim. Ia akan berkonsentrasi di Cawang dan Halim, dokumentasi foto Kali Cipinang dan Pemukiman Halim sudah dicetak oleh Stevany.

Situasi pemukiman Halim, warga tetap tenang dan aman namun selalu waspada, apalagi penggusuran masih terjadi dimana-mana dalam rangka Penutupan Buku APBN akhir tahun 2002. Perihal surat warga yang diajukan ke pihak AURI Halim

Perdana Kusuma sampai sekarang belum ada tanggapan. Maka pada hari Selasa, 3 September 2002 bapak RT, Mulyono akan menemui Ketua RW, Kelurahan Makasar untuk menanyakan surat warga yang telah diajukan ke AURI dan mencari data “gambar peta” dari Kopro Banjir.

Hal yang baru adalah mulai terbukanya *link* atau jaringan antar basis antara warga Halim dengan PKL di Terminal Pulo Gadung serta jaringan para sopir bajaj. Saat ini para pedagang di Pulo Gadung sedang mendapat ancaman penggusuran serius Surat Perintah Bongkar yang ke III, oleh pihak Walikota maupun Kecamatan (Pulo Mas).

Pada hari Selasa, 27 September 2002, perwakilan dari pedagang dari PKL Pulo Gadung telah melakukan pertemuan di rumah bapak Mulyono. Dalam pertemuan tersebut membicarakan masalah penggusuran yang akan mengancam kehidupan minimal 200 PKL lebih. Hasil pertemuan disepakati akan membuat surat ke Walikota Jakarta Timur untuk melakukan negoisasi agar tidak ada penggusuran. Maka pada hari Rabu, 28 Agustus 2002 perwakilan dari PKL Pulo Gadung telah mendatangi kantor Walikota dan bernegoisasi. Berita tersebut dimuat di harian Pos Kota, Kamis, 29 Agustus 2002. Namun isi berita “Walikota tetap akan melakukan penggusuran terhadap PKL di Pulo Gadung”.

Sementara para pedagang di wilayah Halim masih sulit dikoordinasi, meskipun sudah ada pelaksanaan proyek pemagaran oleh Walikota Jaktim. Rencana akan membuat surat ke Walikota tentang pemagaran belum terealisasi. Menurut Ferry (pedagang) ada pedagang yang sempat emosi atas pemagaran tersebut, sampai akan melakukan pembongkaran atas pagar di depan lapaknya. Namun berhasil dicegah karena perbuatan tersebut dapat mengundang reaksi keras oleh pihak Tramtib seperti Cawang dengan alasan PKL tidak tertib.

Bapak Mulyono, menanggapi pedagang Halim yang masih sulit untuk diajak berorganisasi mengatakan “sementara dilakukan pembiaran sampai mereka benar-benar *menthok*” mereka masih mementingkan dirinya masing-masing, belum ada kesadaran untuk membentuk paguyuban yang solid.

Berita terakhir dari bapak Ely Papilaya (pemilik bilyard), ia mengisukan akan ada penggusuran di wilayah Halim pada hari Selasa, 10 September 2002. Infomasi tersebut adalah bocoran dari seorang adiknya yang bekerja di Walikota Jakarta Timur.

Pemagaran di Musholla:

- Hari Rabu, 11 September 2002, pihak PT Demsa akan melanjutkan pemagaran kembali, persisnya di lokasi Musholla dengan luas 407 meter persegi. Semula pagar tersebut akan dilakukan secara lurus di depan Musholla, hingga keberadaan Musholla berada di dalam wilayah PT Demsa. Oleh karena itu warga pemukiman Halim protes kepada pihak PT Demsa. Pemagaran tersebut jelas melanggar karena tanah Musholla dahulu adalah tanah kali.

Namun pihak PT Demsa membantah, tanah tersebut adalah tetap milik PT Demsa, karena perusahaan telah membeli kepada bapak Sahadi dan ada bukti surat-suratnya.

- Usulan dari bapak Mulyono (RT) pemagaran dapat diteruskan dengan cara; posisi Mushola berada di garis tengah pemagaran. Jadi separuh mushola (timur) berada di lokasi warga, dan separuh mushola (barat) berada di lokasi PT Demsa. Menurut bapak Mulyono, usulan tersebut dinilai sudah banyak menguntungkan pihak warga, apalagi dari pihak PT Demsa telah memberikan jalan keliling selebar 2 meter kepada warga. Alasan yang lain adalah apabila diukur ulang pihak warga akan kalah, karena “pathok merah” persis berada di rumah pemukiman warga, yaitu 2 meter dari pinggir kali Cipinang. Kalau warga menuntut ke Pengadilan, malah akan merugikan warga sendiri, karena Pengadilan pasti akan memenangkan Pihak PT Demsa yang memiliki surat-surat secara komplit, sedang pihak warga tidak memiliki surat tanah, karena dahulunya cuma menempati tanah begitu saja. ***“Justru usulan saya ini, karena saya membela dan berjuang untuk warga, karena kalau warga dibalik dituntut secara legal di Pengadilan, pasti akan kalah”.*** Karena usulan ini, saya malah dituduh oleh sekelompok warga telah menerima uang suap dari PT Demsa. Malah ada yang akan mendongkel saya untuk menjadi RT. Saya silakan, saat ini juga saya mundur menjadi RT, kalau ada yang menggantikan saya, syukur yang menggantikan saya siapa tahu akan menjadi lebih baik, kata bapak Mulyono (RT) secara serius.
- Kondisi pemagaran sementara berhenti di area Mushola, belum ada keputusan sampai sekarang. Perlu adanya musyawarah dengan warga Halim dan Karang Taruna untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Meski situasi dianggap oleh warga masih aman, namun adanya issue penggusuran di bantaran kali tetap santer, misalnya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara sudah dilakukan.

Rencana pertemuan warga hari Selasa, 24 September 2002 oleh bapak RT (Mulyono) diundur, karena beberapa warga pulang kampung untuk hajatan dan sebagian warga lainnya menderita sakit.

Kasus yang masih menggantung adalah masalah pemagaran yang berada tepatnya di lokasi Musholla. Pihak PT Demsa akan melanjutkan pemagaran kembali, namun pagar yang akan dibangun berada di luar Musholla, posisi pagar melintas di sebelah timur. Jadi posisi Musholla, total berada di wilayah atas tanah milik PT Demsa. Warga merasa keberatan karena tanah tersebut dahulunya adalah tanah kali yang diurug oleh warga. Maka warga pemukiman Halim mengusulkan pagar tersebut dibangun di sebelah barat Musholla, jadi posisi Musholla total berada di wilayah pemukiman. Usulan warga ditolak oleh pihak PT Demsa, karena pihak PT Demsa telah merasa membeli tanah tersebut dan bukti surat-surat pembelian dapat ditunjukkan kepada warga.

Usulan dari bapak RT (Mulyono), pemagaran dilakukan dengan cara simetris, jadi posisi Musholla separuh sebelah timur berada di permukiman warga, dan separuh Musholla sebelah barat berada di pihak PT Demsa. Jadi warga pemukiman maupun pihak PT Demsa tetap dapat memakai bersama-sama. Usulan tersebut membuat pro dan kontra, karena ada warga yang setuju atas usulannya, namun di sisi lain ada warga yang tetap menginginkan posisi Musholla tetap berada 100% di wilayah permukiman warga.

Pertimbangan bapak RT (Mulyono) adalah bilamana PT Demsa mengajukan ke Pengadilan, posisi PT Demsa berada di pihak yang kuat, karena memiliki surat-surat tanah. Sedangkan warga sama sekali tidak memiliki surat "secuilpun" jadi posisi warga sangat lemah, dan pasti akan kalah. Adanya pemagaran tersebut sebetulnya warga telah diuntungkan karena PT Demsa telah memberikan jalan seluas 2 meter lebih, untuk sekeliling tembok seluas 8.000 meter. Apalagi patok merah batas tanah PT Demsa, setelah diukur posisinya berada tepat di perumahan warga, dan sekarang patok merah tersebut masih tertancap di permukiman warga. Untuk sementara proyek pemagaran terhenti, tepat di samping Musholla karena belum ada kesepakatan antara warga dan PT Demsa.

Rencana konsolidasi untuk warga Halim pada hari Selasa, 24 September 2002 diundur pada hari Minggu, 29 September 2002. Alasan diundurkan pertemuan warga karena beberapa warga pulang ke kampung halaman dan sebagian lagi ada yang sakit.

Masalah pemagaran yang akan dilakukan oleh PT Demsa, khususnya di lokasi sekitar Musholla semakin menjadi perdebatan antara sekelompok warga (Maulin, cs) dengan bapak Mulyono (RT). Ada issue bahwa bapak RT Mulyono akan "didongkel:" dari jabatan RT-nya, warga menilai RT-nya sudah tidak memihak lagi kepada warganya, ia lebih memihak kepada PT Demsa karena telah menerima uang "sogok".

Jawaban dari RT Mulyono sendiri, ia malah senang jika ada orang yang mau menggantikan posisinya untuk menjadi Ketua RT, ***detik ini juga saya siap akan mengundurkan diri, siapa tahu yang menggantikan saya akan lebih semakin baik, kata Mulyono dengan nada seirus. Siapapun yang menjadi Ketua RT, saya siap mendukung, dan saya malah menjadi orang yang merdeka.!***

Warga Pemukiman Halim Resah:

Sejak bulan Juli 2003, warga pemukiman Halim yang berjumlah 133 KK terletak, RT 001, RW 06, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar Jakarta Timur merasa resah. Keresahan warga Halim akibat ada ancaman penggusuran untuk pelebaran kali Cipinang seluas 45 meter disepanjang pemukiman warga.

Pada bulan Agustus 2003, Tanah (Lahan) milik Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, yang letaknya berseberangan dengan pemukiman warga Halim, sudah dibangun pagar. Pemagaran tersebut dalam rangka mengantisipasi Proyek Banjir Kanal Timur yang akan dilaksanakan oleh Pemda DKI. Maka perencanaan pelurusan sungai Cipinang tidak mungkin lagi menggunakan lahan milik Angkatan Udara yang terletak di sebelah timur sungai, tetapi akan menggunakan lahan warga Halim yang letaknya di sebelah barat sungai Cipinang tersebut.

Pada hari Jumat 19 September 2003, sekitar jam 14.00. WIB 2 (dua) orang dari staf Kelurahan yaitu bapak Sarwadi dan bapak Muji memberikan surat ke Ketua RT 001/ RW 06 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Surat tersebut dengan Nomor: 369/073554. Hal: Pendataan Perumahan Dana Pemukiman.

Isi surat:

Sebagai tindak lanjut Surat Tugas kepala Suku Dinas Kodya Jakarta Timur Nomor 65/073544 tanggal 1 Mei 2003 dan hasil rapat tanggal 9 September 2003 di Kantor Suku Dinas Perumahan kodya Jakarta Timur perihal tersebut pada pokok surat diatas, maka bersama ini saya mohon bantuan Ketua RT yang wilayahnya dilalui Kali Cipinang untuk melakukan kegiatan pendataan perumahan dan pemukiman sepanjang kali Cipinang. Adapun hasil pendataan disampaikan ke Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 26 September 2003.

Surat tersebut ditanda tangani oleh Lurah Kebon Pala yaitu Drs. Saamin dengan NIP. 010215753.

Tembusan:

1. Walikotamadya Jakarta Timur
2. Sudin Perumahan Kodya Jakarta Timur
3. Camat Makasar
4. Kasie Perumahan Kecamatan Makasar
5. Ketua RW. 01, 04, 06, 09, 010 dan 011 Kelurahan Kebon Pala.

Lampiran:

Gambar Petunjuk Pelaksanaan Pendataan Tanah dan Bangunan di Bantaran Kali Cipinang. Tanah dan bangunan yang di data jarak 22,5 m dari AS kali Cipinang.

Tuntutan Warga Halim:

1. Komnas HAM segera membentuk KPP HAM untuk menyelidiki pengusuran sebagai pelanggaran HAM.
2. Stop pengusuran!!!

Jakarta, 15 Oktober 2003

Pemukiman Halim:

Tanggal 15 Juni 2004, pertemuan warga Halim dihadiri oleh 25 orang. Inti pertemuan untuk membahas masalah pembagian lahan untuk pedagang kaki lima Halim. Pemetaan lahan dan penataan untuk PKL sudah dibuat tinggal sosialisasi kepada warga yang telah mendaftarkan diri untuk berdagang. Setelah warga mendengar adanya pembagian lahan, banyak warga yang berbondong-bondong mendaftarkan diri dan sangat antusias untuk mendapatkan tempat berdagang. Bapak M. Ely Papilaya dan Marcos S, tiba-tiba muncul seperti pahlawan kesiangan dengan mengklaim sebagai pengurus PKL Halim dan merasa selalu berjuang ke Walikota Jakarta Timur, padahal kenyataannya ketika diajak berjuang bersama tidak pernah muncul.

Pembagian lahan, diatur oleh warga bersama FAKTA yang dikoordinasi oleh Kelly, yang menjadi problem adalah animo yang ingin mendapat lahan sangat banyak, sedang lahan untuk berdagang sangat terbatas.

Penataan PKL, landasan lapak menggunakan konblok agar air hujan tetap dapat meresap ke dalam tanah, apalagi mengingat bahwa lokasi tersebut adalah sebagai jalur hijau dan banyak ditanami tumbuhan bibit baru.

Masalah Banjir Kanal Timur, warga pemukiman Halim menanggapi dengan "*adem-ayem*" karena merasa belum jelas kapan pelaksanaan BKT untuk pemukiman Halim akan dilaksanakan, apalagi menurut warga wilayah Halim hanya normalisasi kali Cipinang.

Untukantisipasi perlu dipupuk kesadaran warga yaitu dengan pendataan warga; luas tanah, luas bangunan, lama tinggal, kepemilikan. Langkah selanjutnya, usulan dari warga untuk memilih bila terjadi penggusuran; Rumah Susun, Relokasi, Tetap Bertahan dan alasannya apa?

Wilayah Halim akan dibangun normalisasi kali dengan lebar kali 45 m, dengan as kali kanan kiri 2,5 m. Sebagai antisipasi penggusuran, harus dibuat pendaataan, sejarah tanah, luas tanah dan bangunan serta sejarah kepemilikan.

Warga RW 07 Kelurahan Makasar, Jaktim yang bermukim di pinggir kali Cipinang mempertanyakan tentang rencana normalisasi kali. Isue program normalisasi kali sudah sejalan lama, namun realisasinya hingga kini belum ada. Warga yang terkena proyek tersebut harus mendapat ganti rugi yang memadai. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayah Kelurahan Makasar (Halim) berkisar Rp 350.000 – Rp 500.000/m² harapan warga masalah ganti rugi meminta 3 kali dari NJOP.

Jumlah warga pemukiman Halim bertambah pesat, semula berjumlah 600 jiwa, melonjak menjadi 800 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk, berdampak pula akan

masalah-masalah yang lebih pelik. Masalah Rumah Susun, mayoritas warga pemukiman Halim tidak bersedia pindah ke rumah susun, kesulitan sosialisasi. Apalagi Rumah Susun tidak akan menjadi milik penghuni, seperti seorang pengontrak pada umumnya membayar kontrakan tiap bulan.

Normalisasi Kali Cipinang, di pemukiman Halim ada indikasi korupsi oleh pelaksana proyek.

“Penilaian kegagalan dalam pendampingan basis, ini menunjukkan ada kelemahan dalam pengorganisasian di lapangan. Namun di sisi lain, perlu dicermati bahwa di basis sendiri telah melakukan apa? Kemudian, apakah FAKTA sendiri yang tidak sabar dalam proses pendampingan, antara idealis dan realita berbeda, tidak seperti yang diharapkan?”

Pendalaman Pelatihan Ansos dan HAM Pemukiman Halim:

Hari Senin, 13 Juni 2005, telah diadakan pertemuan para alumni Pelatihan Ansos dan HAM di rumah Sanah. Pertemuan dihadiri sembilan orang dari sejumlah 29 orang alumni. Sedang empat orang peserta sudah pindah alamat, dan satu orang meninggal dunia (bapak Sirait).

Hasil evaluasi pelatihan; para peserta kesulitan untuk menangkap dan memahami karena bahasa pedamping terlalu tinggi, banyak kata-kata yang belum mengerti. Bobot materi dinilai cukup bagus, perlu diadakan lagi di masing-masing basis agar yang telah diajarkan tidak hilang dan sambung terus-menerus sesuai perkembangan basis.

Daftar Hadir:

- | | |
|-------------|------------|
| 1. Kelly | 6. Susana |
| 2. Pepy | 7. Barsowo |
| 3. Ravi | 8. Mamat |
| 4. Sumiati | 9. Ikhsan |
| 5. Ratmiyah | |

SIRAMDHAN: RABU, 18 OKTOBER 2006

Acara SIRAMDHAN:

- Sambutan Ketua RT (Bp Mulyono)
- Ceramah Walikota Jakarta Timur (Koesnan Halim)
- Santunan Anak Yatim
- Doa Bersama (Ustad Baharudin)

- Sahur bersama
- Penutup

Acara Silaturahmi Ramadhan (SIRAMDHAN) waktunya agak molor tidak sesuai jadwal, waktunya sudah terlalu mepet, acara baru dimulai sekitar pukul 03.10, setelah bapak Koesnan Halim tiba di lokasi.

Acara ramah-tamah dan sambutan dari bapak Koesnan Halim langsung ditujukan kepada anak-anak Yatim. Pertanyaan langsung dilontarkan: “Apakah anak-anak, tidak ada yang sekolah?” Dengan semangat, anak-anak menjawab: “Tidak ada, semuanya sekolah!”. Yang tidak sekolah segera lapor ke Bapak Lurah. Dalam sambutannya, beliau juga berpesan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan, jalan, selokan dan kebersihan kebon dan sekitarnya. Bilamana ada warga yang pulang mudik, kembali ke Jakarta jangan membawa orang. Apalagi orangnya tidak mempunyai keterampilan apa-apa hanya akan menambah masalah.

Santunan kepada anak yatim secara simbolik berjumlah 12 anak-anak, dengan rincian; anak-anak Yatim laki-laki terdapat delapan anak, sedang anak Yatim perempuan berjumlah empat anak.

Setelah penyerahan santunan secara simbolik, langsung meningkat pada acara Siraman Rohani dan doa untuk sahur bersama yang dipimpin oleh Ustad Baharudin. Sahur dengan menu soto ayam ala Jawa Timur secara prasmanan, ternyata memberikan kesan tersendiri bagi warga Halim.

Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2006

Panitia SIRAMDHAM

Kepada Yth

Bp. Drs Koesnan. A. Halim.SH

Walikota Jakarta Timur

Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan menyambut bulan Ramadhan, Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Gokasi mengadakan kerjasama Silaturahmi Ramadhan. Acara tersebut rencananya akan dihadiri oleh Bp Ing. Fauzi Bowo Wakil Gubernur DKI Jakarta. Karena Beliau berhalangan hadir, maka kami mohon kesediannya Bp Walikota Jakarta Timur untuk mewakilinya dan menyerahkan bingkisan kepada anak Yatim dalam acara **Sahur Bersama Warga** pada:

Hari : Rabu (dini hari)

Pukul : 02.30 WIB

Tanggal : 18 Oktober 2006
Tempat : Mushalla Al. Ikhlas
Kampung Sawah Kebon Pala Rt 001/006
Kecamatan Makasar
Jakarta Timur

Besar harapan kami atas kehadiran dan dukungannya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Oktober 2006

Azas Tigor Nainggolan SH. Msi.

MCK:

Masalah MCK belum ada keputusan yang tegas, mengenai siapa yang mengelola, dan bagaimana cara pembagian hasil. Ada usulan MCK tersebut lebih baik dikontrkan, atau di jual. Pada tahun lalu hasil MCK telah terkumpul uang Rp 400.000 akan tetapi uang tersebut dipakai oleh pengurus ketika ada Kunjungan Menkimpraswil.